

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Tanjung

Jalan Ahmad Yani Km 10 No 20, Maburai, Murung Pudak, Tabalong,
Maburai, Kec. Murung Pudak, Tanjung, Kalimantan Selatan 71571
05262027205

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tanjung/id/> (SKPP)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal

Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Tanjung



KPPN

Pengsahan Surat Keterangan
pada KPPN Tanjung

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
2. Copy Surat Keputusan (SK) Pindah/Pensiun
3. Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Tanjung

Jalan Ahmad Yani Km 10 No 20, Maburai, Murung Pudak, Tabalong,
Maburai, Kec. Murung Pudak, Tanjung, Kalimantan Selatan 71571
05262027205

<https://djjb.kemenkeu.go.id/kppn/tanjung/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal

Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Tanjung



KPPN

TANJUNG

1. Satuan Kerja mengajukan SKPP dalam rangkap 3 (tiga) beserta dokumen pendukung dari Satker (termasuk Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier dari Satker) melalui loket persuratan KPPN.
2. Petugas loket akan memeriksa kelengkapan berkas. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, maka berkas dikembalikan.
3. Apabila berkas sudah benar, akan diberi nomor agenda dan meneruskan kepada Kepala KPPN untuk mendapatkan disposisi
4. Berkas SKPP diteruskan kepada Seksi Pencairan Dana/PDMS untuk dilakukan pemeriksaan berkas, penonaktifan data GPP dan supplier. Apabila data tidak benar/lengkap, maka SKPP dikembalikan kepada Satuan Kerja
5. Apabila SKPP telah benar dan lengkap, SKPP ditandatangani oleh Kepala Seksi PD/PDMS, dan dibuatkan surat pengantar untuk dikirimkan sesuai kebutuhan
6. Satuan Kerja mengajukan SKPP dalam rangkap 3 (tiga) beserta dokumen pendukung dari Satker (termasuk Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier dari Satker) melalui loket persuratan KPPN.
7. Petugas loket akan memeriksa kelengkapan berkas. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, maka berkas dikembalikan.
8. Apabila berkas sudah benar, akan diberi nomor agenda dan meneruskan kepada Kepala KPPN untuk mendapatkan disposisi
9. Berkas SKPP diteruskan kepada Seksi Pencairan Dana/PDMS untuk dilakukan pemeriksaan berkas, penonaktifan data GPP dan supplier. Apabila data tidak benar/lengkap, maka SKPP dikembalikan kepada Satuan Kerja
10. Apabila SKPP telah benar dan lengkap, SKPP ditandatangani oleh Kepala Seksi PD/PDMS, dan dibuatkan surat pengantar untuk dikirimkan sesuai kebutuhan

Waktu Penyelesaian

2 Jam

<meta charset="utf-8" />

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Tanjung

Jalan Ahmad Yani Km 10 No 20, Maburai, Murung Pudak, Tabalong,
Maburai, Kec. Murung Pudak, Tanjung, Kalimantan Selatan 71571
05262027205

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tanjung/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal

Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Tanjung



KPPN
TANJUNG

1. Pengesahan SKPP

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung, melalui email: pengaduan151@gmail.com website: <https://s.id/Pengaduan151> <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/> <https://www.wise.kemenkeu.go.id/#/> , nomor telepon WhatsApp: 082155296629 serta kotak layanan pengaduan.